

**PERANAN SEKTOR PERKEBUNAN
TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU:
ANALISIS STRUKTUR INPUT-OUTPUT**

**THE ROLE OF THE PLANTATION SECTOR
TO ECONOMY OF RIAU PROVINCE:
ANALYSIS OF THE INPUT-OUTPUT STRUCTURE**

**Huswatun Hasanah¹⁾, Djaimi Bakce²⁾, Novia Dewi²⁾
Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau
uswatunhasanahsiregar@rocketmail.com**

Abstract

Plantation sector has an important role for the economy of Riau Province, among others, as a provider of employment and sources of income for farmers, the sources of industrial raw materials and sources of basic necessities as well as foreign countries. The purpose of this research is to analyze the role of the plantation sector to the economy of Riau Province through a review of the structure of input-output. The data used in this research is a data input-output table of Riau Province based on producer price transactions in 2012 with the classification of the 17x17 sector of the regional development planning Board (Bappeda) of Riau Province. Results of the analysis show that: *first*, the plantation sector contributes to the economy of Riau Province. Three plantation sectors, which have high contribution is the sector of palm oil, rubber and coconut sector. *Second*, in terms of output, component output forming plantation sector more driven by intermediate output followed by investment and consumption. *Thirdly*, the establishment of the component input, the more the economy is driven by the producer surplus, followed by intermediate input and wages/salaries. Based on those results, in order to encourage economic growth through the development of the plantation sector needs the efforts of the Government and the private sector to increase investment, especially the accumulation of capital sourced from producer surplus.

Keywords: the role of the plantation sector, input-output table, producer surplus

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

²⁾ Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

PENDAHULUAN

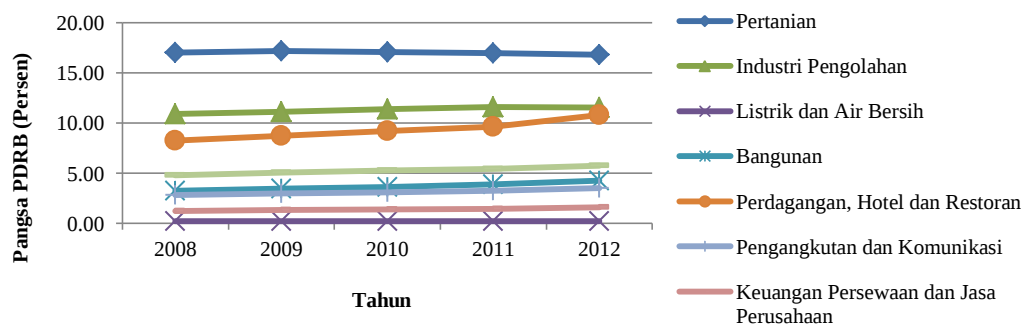
Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumberdaya alam yang dapat dioptimalkan seperti sumberdaya pertanian/perkebunan, sumberdaya pertambangan dan penggalian serta sumberdaya laut/perairan. Selama tahun 2008-2012, sektor pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian Provinsi Riau. Namun, sektor pertambangan tidak dapat diandalkan sebagai motor penggerak dalam perekonomian Provinsi Riau, karena sumberdaya

alam dari sektor pertambangan dan penggalian bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, sektor pertanian khususnya sektor perkebunan diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan sektor pertanian berperan sebagai pemasok bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber pendapatan bagi masyarakat Provinsi Riau.

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB suatu daerah hanya menyajikan dampak langsung (*direct effect*) terhadap perekonomian Provinsi Riau. Berdasarkan PDRB Provinsi Riau atas dasar harga konstan, selama periode tahun 2008-2012, terlihat bahwa kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi sektor ekonomi tanpa migas Provinsi Riau masih didominasi tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk melihat pangsa PDRB sektor ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 1.

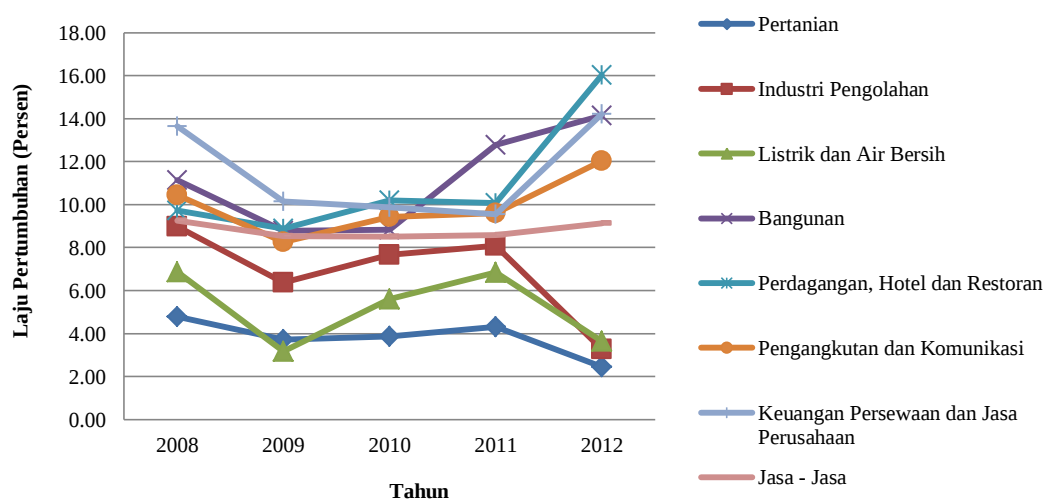


Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

Gambar 1. Perkembangan Pangsa PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa sektor pertanian memiliki pangsa PDRB tertinggi terhadap PDRB tanpa migas Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Riau semakin meningkat. Tingginya pangsa PDRB sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Riau terutama disumbangkan oleh sektor

perkebunan (BPS Provinsi Riau, 2013). Peningkatan pangsa PDRB sektor pertanian terhadap nilai PDRB tidak sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami fluktuasi dan menurun secara signifikan pada tahun 2012. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

Gambar 2. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012

Menurut BPS Provinsi Riau (2013) beberapa faktor penyebab terjadinya fluktuasi pada sektor pertanian diakibatkan oleh anjloknya harga kelapa sawit yang bermula di akhir tahun 2008. Selanjutnya, adanya efek krisis keuangan Eropa yang menekan pertumbuhan sektor perkebunan, sehingga pada tahun 2012 sektor perkebunan hanya tumbuh sebesar 3.27 persen. Terjadinya fluktuasi pada laju pertumbuhan sektor pertanian mengindikasikan bahwa pertumbuhan pengembangan sektor pertanian di Provinsi Riau tidak

stabil. Hal ini dikarenakan tingkat laju pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kondisi kestabilan perekonomian dalam suatu wilayah.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian (perkebunan) di Provinsi Riau, maka perlu dianalisis faktor-faktor yang mendorong pengembangan sektor pertanian (perkebunan) dari sisi output maupun dari sisi input. Dari sisi struktur output yang akan dianalisis yaitu output antara, konsumsi, investasi, dan ekspor. Dari sisi analisis struktur

input yang akan dianalisis adalah input antara, upah/gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Oleh karena itu, tujuan kajian ini adalah menganalisis peranan sektor perkebunan terhadap perekonomian Provinsi Riau dari sisi output dan dari sisi input.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Pembangunan Provinsi Riau diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prasarana dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Riau berhasil, maka seluruh potensi sumberdaya serta kesempatan yang tersedia perlu dimanfaatkan secara tepat waktu, bijaksana dan rasional melalui perencanaan yang matang (Rosyetti, 2011).

Dalam rangka melakukan pengembangan wilayah Provinsi Riau, maka perlu mengoptimalkan berbagai sumberdaya alam yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Riau. Salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Riau yaitu sektor pertanian. Hal ini dikarenakan Provinsi Riau memiliki kesesuaian terhadap jenis lahan, kesuburan lahan dan kesesuaian iklim untuk pengembangan sektor pertanian. Selain itu, sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya budidaya, umumnya diusahakan untuk budidaya perkebunan disamping

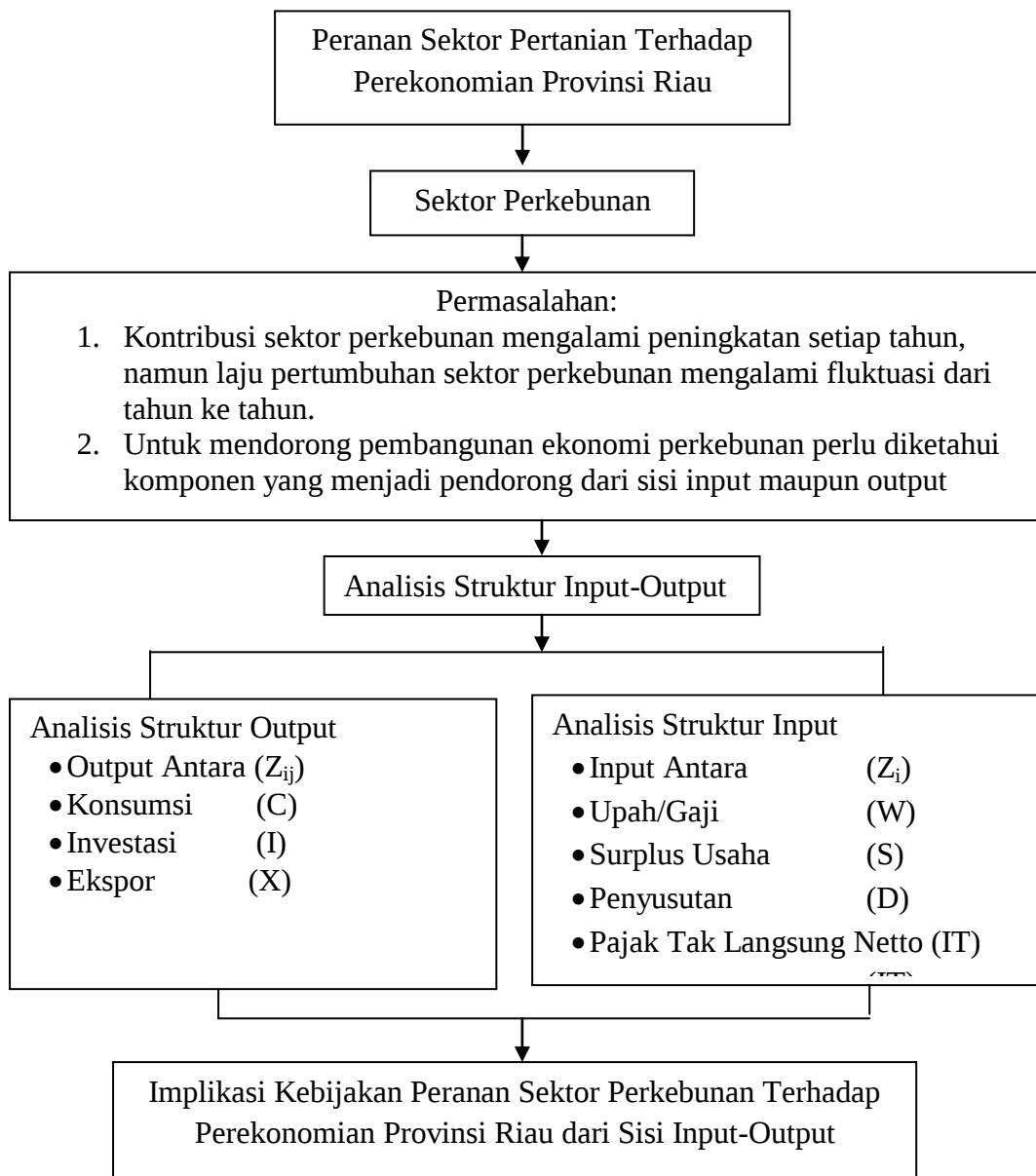
secara terbatas diusahakan untuk tanaman pangan (Bappeda Provinsi Riau, 2013).

Sektor perkebunan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Provinsi Riau, antara lain sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani, sumber bahan baku industri dan sumber kebutuhan pokok serta devisa negara. Sektor perkebunan memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB sektor pertanian di Provinsi Riau, dimana sektor pertanian memiliki nilai PDRB terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian. Selama tahun 2008-2012, laju pertumbuhan sektor pertanian cenderung mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2012. Menurut BPS Provinsi Riau (2013) beberapa faktor penyebab terjadinya fluktuasi pada sektor pertanian diakibatkan oleh anjloknya harga kelapa sawit yang bermula di akhir tahun 2008. Selanjutnya, adanya efek krisis keuangan Eropa yang menekan pertumbuhan sektor perkebunan, sehingga pada tahun 2012 sektor perkebunan hanya tumbuh sebesar 3.27 persen. Kuncoro (2010) mengemukakan bahwa telah terjadinya proses transformasi struktural menyebabkan kontribusi sektor pertanian di gantikan oleh sektor industri.

Peranan sektor perkebunan terhadap perekonomian Provinsi Riau dapat diketahui dengan menganalisis struktur output dan struktur input sektor perkebunan. Analisis struktur output dapat dilihat dari distribusi output sektor perkebunan terhadap output antara, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan net ekspor

(ekspor dikurang impor). Analisis struktur input dapat dilihat dari penggunaan input produksi yang berasal dari input antara, tenaga kerja, surplus usaha, penyusutan atau pajak tak langsung netto. Setelah menganalisis struktur ekonomi sektor perkebunan dapat dirumuskan implikasi kebijakan untuk

meningkatkan peran sektor perkebunan dalam perekonomian Provinsi Riau. Adapun alur kerangka pemikiran peranan sektor perkebunan terhadap perekonomian Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Studi Peranan Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Provinsi Riau: Analisis Struktur Input-Output

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah data sekunder yaitu data tabel input-output Provinsi Riau berdasarkan transaksi harga produsen tahun 2012 dengan klasifikasi 17 x 17 sektor. Tabel input-output Provinsi Riau tahun 2012 merupakan tabel input-output yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau.

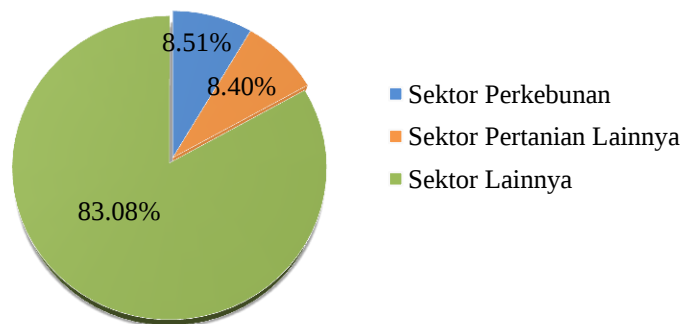
Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif struktur input-output sektor perkebunan Provinsi Riau melalui tabel input-output Provinsi Riau tahun 2012. Jumlah sektor yang dianalisis sebanyak 17 sektor yang diagregasi dari tabel input-output Provinsi Riau tahun 2012 berdasarkan transaksi harga produsen klasifikasi 112 x 112 sektor. Analisis deskriptif tabel input-output untuk mengetahui proporsi sektor perkebunan melalui sisi input

maupun output serta mengetahui kontribusi komponen pembentuk input dan output sektor perkebunan.

PERANAN SEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

Berdasarkan tabel input-output Provinsi Riau klasifikasi 17 x 17 sektor berdasarkan transaksi harga produsen tahun 2012 bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, menunjukkan bahwa sektor perkebunan memberikan peranan yang besar terhadap perekonomian Provinsi Riau. Sektor perkebunan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian Provinsi Riau yaitu sebesar 8.51 persen dari total seluruh sektor perekonomian yang ada di Provinsi Riau. Untuk lebih rincinya mengenai kontribusi output sektor perkebunan dan sektor lainnya dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2012 (diolah)

Gambar 4. Kontribusi Output Sektor Perkebunan dan Sektor Lainnya Terhadap Perekonomian Provinsi Riau Tahun 2012

Tingginya kontribusi sektor perkebunan mengindikasikan bahwa sektor perkebunan mampu menciptakan nilai tambah yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Riau. Selain itu, sektor

perkebunan juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani, sumber bahan baku industri dan sumber kebutuhan pokok serta devisa negara. Adapun sektor perkebunan yang

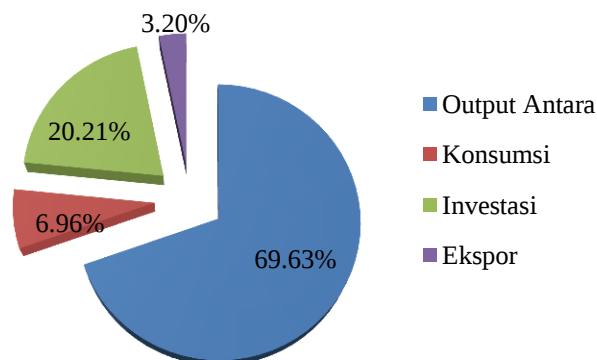
menjadi sektor primadona di Provinsi Riau adalah sektor kelapa sawit, sektor karet dan sektor kelapa. Untuk lebih detailnya akan dibahas bagaimana kontribusi masing-masing sektor perkebunan dari sisi output dan dari sisi input .

Struktur Output sektor Perkebunan

Output merupakan nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu wilayah (negara, provinsi dan sebagainya) dalam suatu periode waktu tertentu (umumnya satu tahun), tanpa memperhatikan asal-usul pelaku produksi (BPS Indonesia, 2008). Komponen pembentuk output terdiri dari output antara dan permintaan akhir. Output antara adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk proses lebih lanjut pada sektor produksi. Permintaan akhir merupakan nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir domestik

seperti konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), investasi (I) dan ekspor netto (X-M).

Sukirno (2011) mengemukakan bahwa konsumsi rumahtangga merupakan pengeluaran rumahtangga ke atas barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran atas barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ekspor merupakan seluruh atau sebagian dari nilainya merupakan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Pada Gambar 5 diperlihatkan komponen-komponen yang mendukung pembentukan output sektor perkebunan di Provinsi Riau.



Sumber: Bapedda Provinsi Riau, 2012 (diolah)

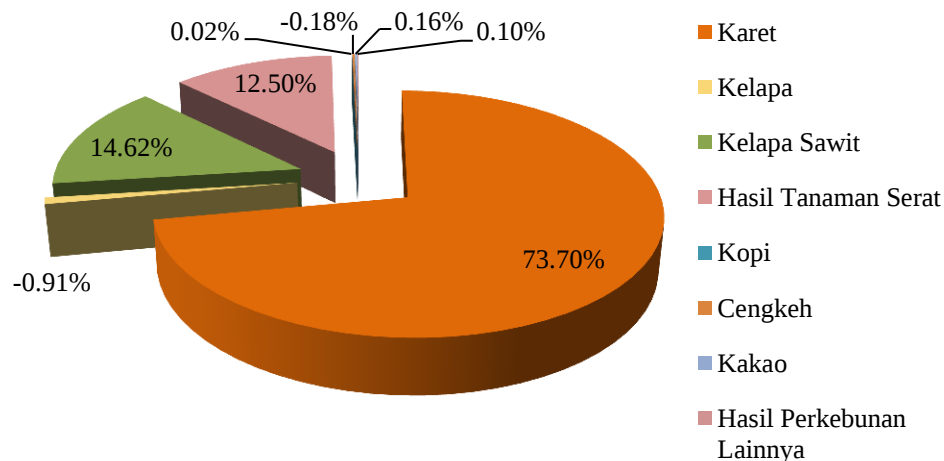
Gambar 5. Komponen Pembentuk Output Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Provinsi Riau Tahun 2012

Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa komponen pembentukan output sektor perkebunan lebih didorong oleh output antara sebesar 69.63 persen,

diikuti oleh investasi sebesar 20.21 persen dan konsumsi sebesar 6.96 persen dari total output sektor perkebunan. Struktur ekonomi sektor perkebunan yang didorong oleh

investasi mengindikasikan bahwa masyarakat di Provinsi Riau melakukan upaya penghematan dengan berinvestasi pada sektor perkebunan. Tingginya kontribusi output sektor perkebunan terhadap investasi menunjukkan bahwa sektor

perkebunan merupakan sektor potensial yang akan dikembangkan dalam jangka panjang di Provinsi Riau. Untuk lebih rincinya mengenai kontribusi sektor perkebunan terhadap investasi dapat dilihat pada Gambar 6.



Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2012 (diolah)

Gambar 6. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Investasi di Provinsi Riau Tahun 2012

Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa sektor perkebunan yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap investasi adalah sektor karet diikuti oleh sektor kelapa sawit dan sektor hasil tanaman serat. Meskipun sektor hasil tanaman serat memiliki kontribusi tertinggi ketiga terhadap investasi di sektor perkebunan, ternyata sektor hasil tanaman serat bukan sektor primadona Provinsi Riau. Sektor hasil tanaman serat tidak dibudidayakan secara komersial serta umumnya berkembang di luar Provinsi Riau. Sektor perkebunan yang potensial dan menjadi sektor primadona di Provinsi Riau adalah sektor kelapa sawit dan sektor karet. Sektor kelapa sawit memiliki areal perkebunan terluas di sektor perkebunan serta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas

Perkebunan Provinsi Riau (2013) luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahun 2012 sebesar 2,3 juta Ha dengan jumlah produksi 7,3 juta ton per tahun. Jumlah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) menjadi Minyak Sawit Mentah (MKS) sekitar 146 PKS dengan kapasitas produksi sebesar 6,254 ton TBS/ jam.

Menurut Syahza (2013), perkembangan produksi kelapa sawit tidak sebanding dengan pembangunan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Provinsi Riau. Hal ini mengakibatkan menumpuknya hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) baik di sekitaran kebun masyarakat ataupun di PKS, sehingga akan mempengaruhi mutu TBS dan menyebabkan penurunan harga jual TBS. Dalam rangka mendorong pengembangan sektor perkebunan

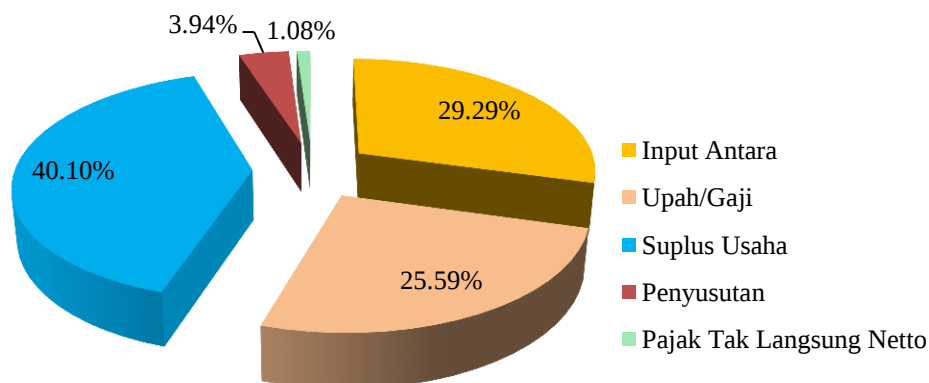
khususnya sektor kelapa sawit, maka perlu melakukan kebijakan insentif terhadap pengusaha-pengusaha yang telah ada untuk melakukan investasi yaitu melakukan pengembangan pabrik pengolahan kelapa sawit di Provinsi Riau. Kebijakan insentif yang dilakukan yaitu memberikan fasilitas pembebasan pajak (*tax holiday*) bagi perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan modal baru serta menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan produksi.

Stuktur Input Sektor Perkebunan

Input menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Input merupakan penjumlahan input antara dengan input primer atau Nilai Tambah Bruto (NTB). Adapun komponen pembentuk input terdiri dari input antara dan input primer atau nilai tambah bruto. Input antara merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis dalam proses produksi. Input primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Faktor produksi antara lain terdiri

dari tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Wujud dari input primer adalah upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tak langsung dan subsidi.

BPS Indonesia (2008) mengemukakan bahwa upah /gaji merupakan balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi. Surplus usaha adalah balas jasa kewiraswastaan dan pendapatan atas kepemilikan modal. Penyusutan adalah biaya atas pemakaian barang modal tetap dalam kegiatan produksi, pajak tak langsung netto adalah selisih pajak tak langsung dengan subsidi. Besarnya nilai tambah di tiap-tiap sektor ditentukan oleh besarnya output (nilai produksi) yang dihasilkan dan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, suatu sektor yang memiliki output yang besar belum tentu memiliki nilai tambah yang besar juga, karena masih tergantung seberapa besar biaya produksinya. Pada Gambar 7 berikut terlihat komponen pembentuk input yang menjadi pendorong sektor perkebunan.



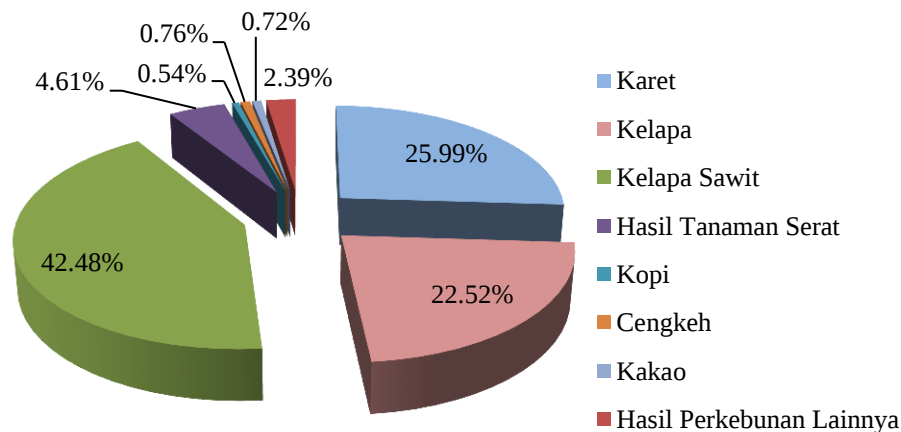
Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2012 (diolah)

Gambar 7. Kontribusi Input Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Provinsi Riau Tahun 2012.

Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa komponen pembentuk input sektor perkebunan di dorong oleh surplus usaha, selanjutnya diikuti oleh input antara dan upah/gaji. Upah/gaji pada sektor perkebunan memiliki kontribusi relatif rendah apabila dibandingkan dengan surplus usaha, padahal upah/gaji merupakan satu-satunya komponen nilai tambah yang bisa diterima (dibawa pulang) oleh pekerja. Surplus usaha belum tentu dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, khususnya tenaga kerja, karena surplus usaha tersebut ada yang tersimpan atau ditanam di perusahaan dalam bentuk laba yang ditahan. Tingginya kontribusi surplus usaha pada sektor perkebunan mengindikasikan bahwa sektor perkebunan di Provinsi Riau cenderung bersifat padat modal yaitu memerlukan sumberdaya finansial

dalam jumlah besar guna menghasilkan suatu produk perkebunan yang lebih baik.

Pahan (2011) mengemukakan bahwa perkebunan (*plantation*) merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial yang diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian komersial dalam skala besar dan kompleks dan bersifat padat modal (*capital intensive*), menggunakan lahan yang luas, memiliki organisasi tenaga kerja yang besar dengan pembagian kerja yang rinci, menggunakan teknologi yang modern, spesialisasi, serta sistem administrasi dan birokrasi. Pada Gambar 8 berikut disajikan kontribusi masing-masing sektor perkebunan terhadap surplus usaha sektor perkebunan di Provinsi Riau.



Sumber: Bapedda Provinsi Riau, 2012 (diolah)

Gambar 8. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Surplus Usaha di Provinsi Riau Tahun 2012.

Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa sektor perkebunan yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap surplus usaha adalah sektor kelapa sawit, sektor

karet dan sektor kelapa. Tingginya kontribusi sektor kelapa sawit terhadap surplus usaha mengindikasikan bahwa sektor tersebut bersifat padat modal atau

capital intensive. Hal ini juga dapat dilihat dari sifat usaha sektor kelapa sawit yang panjang, sehingga membutuhkan akumulasi modal dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman semusim ataupun rata-rata tanaman perkebunan lainnya. Pahan (2011) mengemukakan bahwa investasi untuk membangun perkebunan kelapa sawit memerlukan modal yang besar dan waktu pengembalian yang lama, dimana perkebunan kelapa sawit baru akan menghasilkan setelah 2-3 tahun ditanam dilapangan.

PENUTUP

Sektor perkebunan memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Riau baik dari sisi input maupun dari sisi output. Berdasarkan analisis struktur output menunjukkan bahwa sektor perkebunan Provinsi Riau didorong oleh investasi, sedangkan analisis struktur input memperlihatkan sektor perkebunan didorong oleh surplus usaha. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap investasi dan surplus usaha adalah sektor kelapa sawit.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan baik dari sisi output maupun dari sisi input, maka diperlukan upaya peningkatan investasi langsung dan tidak langsung melalui akumulasi modal yang berasal dari surplus usaha. Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang perlu dilakukan pemerintah antara lain memberikan kemudahan perizinan, memberikan fasilitas pembebasan pajak (*tax holiday*) bagi perusahaan-perusahaan yang akan

menanamkan modal baru serta menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan produksi khususnya untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013. PDRB Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012. Badan Pusat Statistik. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2008. Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2008. Teknik Penyusunan Tabel Input-Output. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. 2012. Tabel Input-Output Provinsi Riau Atas Dasar Harga Produsen. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pekanbaru.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019. Provinsi Riau.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2013. Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2012. www.riau.go.id. Diakses pada tanggal 3 Desember 2015.

Kuncoro, M. 2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Pahan, I. 2011. Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir. Penebar swadaya, Jakarta.

Rosyetti. 2011. Analisis Sektor Potensial Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.

Sukirno, S. 2011. Makroekonomi Teori Pengantar. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syahza, A. 2013. Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit.
www.almasdi.staff.unri.ac.id.
Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2015.